

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus N.Cahyo, 2012. *Tips Membuka Usaha Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*, Cetakan Pertama, D-Medika, Yogyakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Cetakan pertama, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Andi Fahmi Lubis.dkk, 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Arie Siswanto, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aryo Bogadenta, 2012. *Manajemen Pengelolaan Apotek*, D-Medika, Yogyakarta.
- Bernard L.Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-IV, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Djuanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara Dprd Dan Kepala Daerah*, Bandung, Alumni
- E.Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Galuh Puspa Ningrum, 2013. *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja pressindo, Yogyakarta
- Hermansyah, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke dua, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktinya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurwigati, tt, *Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintah*, disampaikan dalam diskusi Akademik Dosen Fakultas Hukum UMY
- Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika

Rachmadi Usman, 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sitiatava Rizema Putra, 2013. *Buku Pintar Apoteker*, Diva Press, Yogyakarta.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh

The Liang Gie, tt. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta

B. Jurnal dan Website

Marchaban, 2011, *jurnal manajemen dan pelayanan farmasi*, vol.1 No.2/Juni 2011, Pascasarjana Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada, hlm.104

Arif Junianto, “Jual Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Sebuah Apotik di Bantul Disegel, dalam <http://www.harianjogja.com>, Selasa, 23 Juni 2015, 14:20 WIB

Budi Cahyono, “Apotik dan klinik di Sleman dirazia” dalam <http://www.jogja.com>. Diakses 18 Oktober 2015. jam 20.30 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/v/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 24.7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja BPPPT